



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANTUL

2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul ini berisi tentang informasi seputar pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025. Baik mengenai pencapaian atau realisasi target kinerja per kegiatan, juga memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja tersebut. Dilengkapi pula dengan informasi-informasi non keuangan yang kami pandang perlu untuk melengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan ini

Harapan kami, Catatan Atas Laporan Keuangan ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Selanjutnya kritik, saran dan bimbingan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul di tahun-tahun mendatang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,



MUJAHID AMRUDIN, S.IP

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197005111998031002

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,



MUJAHID AMRUDIN, S.IP

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197005111998031002

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan SKPD Tahun 2025 disusun secara tepat waktu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Sedangkan Neraca SKPD merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan SKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan SKPD bertujuan untuk memberikan

informasi mengenai :

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
- b. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
- c. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun 2025, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Program Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Entitas Akuntansi

6.2 Informasi-Informasi Lain

Bab VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Rencana Strategis merupakan sebuah perencanaan jangka menengah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Perencanaan strategis dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan yang akan dilakukan sebuah lembaga pemerintah. Sebagai sebuah institusi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul membutuhkan acuan bagi kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian). Rencana Strategis juga dapat menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan. Tanpa sebuah perencanaan strategis maka sulit diketahui rencana kerja sebuah lembaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul baru definitif berdiri pada tanggal 11 Januari 2011 dan diatur dalam Perda Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul ini menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang Pemerintah di tingkat kabupaten untuk mengurangi risiko bencana. Beberapa dinas dan badan di Kabupaten Bantul, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun mitra pembangunan internasional, telah mengembangkan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Kabupaten Bantul setelah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan HVCR (Hazard, Vulnerability, Capacity, and Risk) ternyata merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Sampai tahun 2025 dari hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli ada sebelas jenis bencana yang ada di Kabupaten Bantul yaitu gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kekeringan, gelombang pasang, abrasi pantai, kebakaran, dampak letusan gunung berapi, kegagalan teknologi dan

tanah longsor, banjir dan kebakaran walaupun sifatnya hanya lokal namun kejadian tersebut banyak merusak sarana infrastruktur dan kerugian harta benda. Dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang rawan bencana, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran umum rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 5 tahun ke depan.

Pengaruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada sektor riil cukup luas dan mendalam diantaranya adalah :

1. Terciptanya rasa tenang dari kemungkinan adanya bencana;
2. Semakin siap, tanggap dan tangguhny masyarakat Kabupaten Bantul terhadap bencana;
3. Peningkatan peran masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
4. Penyebarluasan informasi potensi bencana;
5. Terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten
6. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pasca bencana (Pohon tumbang, Kebakaran, Banjir, Tanah longsor, dll)

Kecepatan dan ketepatan bertindak tim Pusdalops dalam penyebarluasan informasi dan sebagai bank data kebencanaan, TRC (Tim Reaksi Cepat) yg bertugas sebagai assesment, Damkarmat (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) yang telah dilengkapi mobil pemadam kebakaran sebanyak 8 armada dan gedung pos pemadam kebakaran sebanyak 7 unit pos. Droping Air Bersih, mobil Toilet telah mampu menurunkan ketegangan masyarakat dalam menghadapi bencana. Situasi ini akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Demikian pula di Kabupaten Bantul pembangunan ekonomi selalu dipengaruhi oleh kondisi tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan fungsi perlindungan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana (sosial, ekonomi, alam, dan teknologi) yang pada tahapan selanjutnya masyarakat diharapkan mampu, siap tanggap dan tangguh menghadapi situasi yang sering berubah-ubah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, mencakup spek kebijakan dibidang belanja / pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

**Realisasi Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2026**

Koderek					Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.356.180.462,20	12.443.075.877,00	1.913.104.585,20
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.375.000,00	23.148.780,00	7.226.220,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.400.000,00	10.402.633,00	3.997.367,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.975.000,00	12.746.147,00	3.228.853,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.287.709.919,20	7.004.293.733,00	1.283.416.186,20
1	05	01	2.01	0001	Penyediaangaji dan Tunjangan ASN	8.186.389.919,20	6.905.371.417,00	1.281.018.502,20
1	05	01	2.01	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.820.000,00	90.480.000,00	2.340.000,00
1	05	01	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.500.000,00	8.442.316,00	57.684,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.200.000,00	185.524.000,00	21.676.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	203.700.000,00	182.049.000,00	21.651.000,00
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.500.000,00	3.475.000,00	25.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.701.710,00	278.926.191,00	20.775.519,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	31.413.150,00	31.131.270,00	281.880,00



Badan
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

					Penerangan Bangunan Kantor			
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.257.800,00	49.137.045,00	8.120.755,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.171.260,00	7.168.000,00	3.260,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	17.045.500,00	16.332.055,00	713.445,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	15.377.000,00	15.376.800,00	200,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	29.958.228,00	41.772,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	93.062.000,00	84.828.293,00	8.233.707,00
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	44.125.000,00	41.005.000,00	3.120.000,00
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.250.000,00	3.989.500,00	260.500,00
1	05	01	2.07		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.417.000,00	512.020.852,00	31.396.148,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.800.000,00	49.425.750,00	374.250,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	493.617.000,00	462.595.102,00	31.021.898,00
1	05	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.760.251.658,00	3.277.129.634,00	483.122.024,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.500.000,00	-
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	24.000.000,00	12.340.102,00	11.659.898,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.730.751.658,00	3.259.289.532,00	471.462.126,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.227.525.175,00	1.162.032.687,00	65.492.488,00



1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.830.000,00	124.191.550,00	8.638.450,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	705.191.875,00	684.467.522,00	120.724.353,00
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.450.000,00	6.438.000,00	12.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	97.400.000,00	91.015.172,00	6.384.828,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.653.300,00	255.920.443,00	29.732.857,00
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	4.759.177.440,00	4.209.224.774,00	549.952.666,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	672.292.000,00	580.862.639,00	91.429.361,00
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenisBencana)	656.088.000,00	566.109.936,00	89.978.064,00
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	16.204.000,00	14.752.703,00	1.451.297,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	2.913.290.590,00	2.628.993.264,00	284.297.326,00
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	4.500.000,00	0
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	1.500.543.190,00	1.467.872.161,00	32.671.029,00
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	188.889.000,00	78.753.750,00	110.135.250,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ kota	72.827.500,00	64.840.000,00	7.897.500,00



1	05	03	2.02	0019	Pelatihan KeluargaTanggap Bencana Alam	55.000.000,00	53.000.000,00	2.000.000,00
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	304.769.900,00	280.068.500,00	24.701.400,00
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	27.625.000,00	10.475.000,00	17.150.000,00
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten / Kota	96.114.000,00	61.442.200,00	34.671.800,00
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	37.362.000,00	17.005.000,00	0
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana KesiapsiagaanTerhadap Bencana Kabupaten / Kota	625.660.000,00	591.036.653,00	34.623.347,00
1	05	03	2	03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.036.119.850,00	921.504.871,00	114.614.979,00
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar BiasaPenyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	1.700.000,00	1.700.000,00	0
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	16.950.000,00	12.500.000,00	4.450.000,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	249.961.900,00	219.701.200,00	30.260.700,00
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	4.990.000,00	3.400.000,00	1.590.000,00
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	40.225.000,00	32.162.500,00	8.062.500,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	457.970.000,00	407.182.091,00	50.787.909,00
1	05	03	2.03	0010	Respon cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit	425.000,00	425.000,00	0
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem komando Penanganan Darurat Bencana	263.897.950,00	244.434.080,00	19.463.870,00



Badan
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	137.475.000,00	77.864.000,00	59.611.000,00
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	21.350.000,00	13.500.000,00	7.850.000,00
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	13.850.000,00	10.950.000,00	2.900.000,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten /Kota	9.955.000,00	7.788.500,00	2.166.500,00
1	05	03	2.04	0012	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / kota	70.075.000,00	45.625.500,00	24.449.500,00
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	22.245.000,00	0	22.245.000,00
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.641.541.650,00	2.550.244.273,00	91.297.377,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakarandalan Daerah Kabupaten / Kota	1.986.777.000,00	1.916.353.288,00	70.423.712,00
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	9.775.000,00	9.775.000,00	0
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakarandalan Daerah Kabupaten / Kota	263.400.000,00	242.063.038,00	21.336.962,00
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.000.000,00	24.965.000,00	35.000,00
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Saranan dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5.000.000,00	5.000.000,00	0
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	24.146.000,00	22.766.000,00	1.380.000,00
1	05	04	2.01	0008	Pengolahan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1.775.000,00	1.775.000,00	0



1	05	04	2.01	0012	Peningkatan kompetensi pejabat Fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	24.756.000,00	23.000.000,00	1.756.000,00
1	05	04	2.01	0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	31.500.000,00	30.837.000,00	663.000,00
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	1.597.175.000,00	1.551.922.250,00	45.252.750,00
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Non Kebakaran	4.250.000,00	4.250.000,00	0
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	14.262.400,00	12.362.400,00	1.900.000,00
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.860.000,00	4.050.000,00	800.000,00
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana, Prasarana Proteksi Kebakaran	9.412.400,00	8.312.400,00	1.100.000,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	395.482.750,00	380.779.600,00	14.703.150,00
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	263.460.200,00	250.437.200,00	3.023.000,00
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	117.584.300,00	106.332.800,00	11.251.500,00
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	24.438.250,00	24.009.600,00	428.650,00
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	245.019.500,00	240.748.985,00	4.270.515,00
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	39.947.500,00	39.176.985,00	770.515,00



1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	5.000.000,00	3.350.000,00	1.650.000,00
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	14.422.000,00	13.572.000,00	850.000,00
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	185.650.000,00	184.650.000,00	1.000.000,00
					JUMLAH	21.756.899.552,20	19.202.544.924,00	2.554.354.628,20



2.3 Program Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program kegiatan. Secara umum kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Tahun 2025 BPBD mengampu 1 urusan yaitu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta melaksanakan 3 program dengan 16 kegiatan dan 68 subkegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Pencapaian target kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah sampai akhir tahun anggaran 2025 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Pencapaian Target Kinerja APBD															
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul															
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025															
N o	Sasara n	Kode Rekenin g	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perubahan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	
1	2		3	4	4a	5		6		7c		12=11		X = 12/7c x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	angka	0,95	43.637.649.00 0	0,72	47.743.864.03 1	0,94	19.115.357.90 2	1	16.652.300.65 1	77,66	87,11
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	29.259.202.00 0	82	34.030.824.34 4	83,00	14.356.180.46 2	81	12.443.075.87 7	97,71	86,67
		1.05.01. 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	96	232.625.000	100	54.265.000	96	30.375.000	100	23.148.780	104,17	76,21



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	95.925.000	21	37.972.500	7	14.400.000	7	10.402.633	100,00	72,24
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	25	136.700.000	15	16.292.500	5	15.975.000	5	12.746.147	100,00	79,79
		1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	99	516.340.000	100	13.513.205.081	98	8.287.709.919	100	7.004.293.733	102,04	84,51
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	165	467.340.000	477	13.329.345.081	1.064	8.186.389.919	1064	6.905.371.417	100,00	84,35
		1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24.000.000	24	168.660.000	12	92.820.000	12	90.480.000	100,00	97,48
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	105	25.000.000	42	15.200.000	21	8.500.000	21	8.442.316	100,00	99,32
		1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	98	20.000.000	100	4.288.040.016	97	207.200.000	100	185.524.000	103,09	89,54
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	20.000.000	201	4.288.040.016	100	203.700.000	100	182.049.000	100,00	89,37



		1.05.01. 2.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					1	3.500.000	1	3.475.000	100,00	99,29
		1.05.01. 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	97	2.143.320.348	74,35	1.005.470.545	96	299.701.710	100	278.926.191	104,17	93,07
		1.05.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	250.817.000	25	73.850.267	5	31.413.150	5	31.131.270	100,00	99,10
		1.05.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	95	236.885.600	65	233.977.975	19	57.257.800	19	49.137.045	100,00	85,82
		1.05.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	80	63.150.000	22	93.934.955	16	7.171.260	16	7.168.000	100,00	99,95
		1.05.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	400.451.500	9	14.925.000	5	17.045.500	5	16.332.055	100,00	95,81
		1.05.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	262.937.948	16	117.417.250	5	15.377.000	5	15.376.800	100,00	100,00
		1.05.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	60.000.000	48	108.462.500	40	30.000.000	40	29.958.228	100,00	99,86
		1.05.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	833.990.000	111	347.708.445	20	93.062.000	20	84.828.293	100,00	91,15



		1.05.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	35.088.300	33	15.194.153	12	44.125.000	12	41.005.000	100,00	92,93
		1.05.01. 2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	4.250.000	1	3.989.500	100,00	93,87
		1.05.01. 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	457.275.000	100	387.069.945	95	543.417.000	100	512.020.852	105,26	94,22
		1.05.01. 2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					8	49.800.000	8	49.425.750	100,00	99,25
		1.05.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	37	457.275.000	67	387.069.945	13	493.617.000	13	462.595.102	100,00	93,72
		1.05.01. 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	97	21.927.910.58 6	100	11.874.432.37 5	96	3.760.251.658	100	3.277.129.634	104,17	87,15
		1.05.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	25.500.000	24	15.750.000	12	5.500.000	12	5.500.000	100,00	100,00
		1.05.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	270.200.000	24	55.923.554	12	24.000.000	12	12.340.102	100,00	51,42
		1.05.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60	21.632.210.58 6	24	11.802.758.82 1	12	3.730.751.658	12	3.259.289.532	100,00	87,36
				Umum Kantor yang Disediakan											



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008,

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

		1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	97	3.961.731.066	100	2.908.341.382	96	1.227.525.175	100	1.162.032.687	104,17	94,66
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	339.172.000	10	239.843.755	3	132.830.000	3	124.191.550	100,00	93,50
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	192	2.196.515.000	106	1.912.089.259	38	705.191.875	38	684.467.522	100,00	97,06
		1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	75	22.300.000	23	13.185.000	15	6.450.000	15	6.438.000	100,00	99,81
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	664	980.550.000	144	469.073.894	140	97.400.000	140	91.015.172	100,00	93,44
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	423.194.066	19	274.149.474	10	285.653.300	10	255.920.443	100,00	89,59
		1.05.03		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	45	11.420.917.000	35	8.670.870.955	44	4.759.177.440	44	4.209.224.774	100,00	88,44



				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100		100	0	100		100	0	100,00	
				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		100	0	100		100	0	100,00	
				Indeks Pemulihan Pascabencana	Angka	65		55	0	64		0	0	0,00	
		1.05.03.2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	75	882.000.000	100	2.200.726.500	74	672.292.000	100	580.862.639	135,14	86,40
		1.05.03.2.01.03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	430.000.000	1	198.965.000	1	16.204.000	1	14.752.703	100,00	91,04
		1.05.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman	Orang	1800	452.000.000	1200	2.001.761.500	4.200	656.088.000	4200	566.109.936	100,00	86,29



Batas
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

				yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya											
		1.05.03	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	80	7.954.851.000	100	5.184.095.610	79	2.913.290.590	100	2.628.993.264	126,58	90,24
		1.05.03. 2.02.20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	72	729.927.000	24	531.639.750	9	304.769.900	9	280.068.500	100,00	91,90
		1.05.03. 2.02.21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	150	429.992.000	108	116.026.680	28	27.625.000	28	10.475.000	100,00	37,92
		1.05.03. 2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	900	528.400.000	350	244.997.000	200	72.827.500	200	64.840.000	100,00	89,03
		1.05.03. 2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	20	17.482.000	40	55.000.000	40	53.000.000	100,00	96,36
		1.05.03. 2.02.14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	120.000.000	1	173.897.350	1	4.500.000	1	4.500.000	100,00	100,00



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

		1.05.03. 2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	192	2.910.000.000	258	2.817.514.637	41	1.500.543.190	41	1.467.872.161	100,00	97,82
		1.05.03. 2.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	3300	2.805.532.000	750	820.295.200	400	188.889.000	400	78.753.750	100,00	41,69
		1.05.03. 2.02.26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	48	431.000.000	36	462.242.993	14	625.660.000	14	591.036.653	100,00	94,47
		1.05.03. 2.02.002 2	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun						4	96.114.000	4	61.442.200	100,00	63,93



		1.05.03. 2.02.002 3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun						1	37.362.000	1	17.005.000	100,00	45,51
		1.05.03. 2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	1.299.800.000	61,210 5	943.302.095	100	1.036.119.850	100	921.504.871	100,00	88,94
		1.05.03. 2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	4	20.000.000	6	23.085.000	1	1.700.000	1	1.700.000	100,00	100,00
		1.05.03. 2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	161.350.000	3	97.050.000	1	16.950.000	1	12.500.000	100,00	73,75
		1.05.03. 2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	3850	479.400.000	1845	161.536.000	950	249.961.900	950	219.701.200	100,00	87,89



		1.05.03. 2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	3850	472.500.000	1644	412.744.185	950	457.970.000	950	407.182.091	100,00	88,91
		1.05.03. 2.03.10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	5	145.000.000	3	7.107.410	1	425.000	1	425.000	100,00	100,00
		1.05.03. 2.03.11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	4	21.550.000	3	241.779.500	1	263.897.950	1	244.434.080	100,00	92,62
		1.05.03. 2.03.000 7	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen					1	4.990.000	1	3.400.000	100,00	68,14
		1.05.03. 2.03.000 8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang					50	40.225.000	50	32.162.500	100,00	79,96



		1.05.03.2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	90	1.284.266.000	73,75	342.746.750	89	137.475.000	79	77.864.000	88,76	56,64
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	41.000.000	2,5	5.412.500	4	21.350.000	4	13.500.000	95,00	63,23
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	260.475.000	3	193.894.500	1	70.075.000	1	45.625.500	100,00	65,11
		1.05.03.2.04.08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	8	982.791.000	32	140.864.750	60	13.850.000	60	10.950.000	100,00	79,06



		1.05.03. 2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	0	0	2	1.512.500	1	9.955.000	1	7.788.500	100,00	78,24
		1.05.03. 2.04.13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	0	1.062.500	2	22.245.000	0	0	0,00	0,00
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan			Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	menit	14,36	2.957.530.000	8,82	5.042.168.732	14,38	2.641.541.650	9	2.550.244.273	161,34	96,54
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	2.957.530.000	100	5.042.168.732	100	2.641.541.650	100	2.550.244.273	100,00	



		1.05.04.2.01	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	89	1.798.580.000	88,889	3.270.773.515	88	1.986.777.000	100	1.916.353.288	113,64	96,46
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	4	69.650.000	2	148.171.300	1	9.775.000	1	9.775.000	100,00	100,00
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	150	392.980.000	96	249.801.970	12	263.400.000	12	242.063.038	100,00	91,90
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	48	103.700.000	24	85.310.000	12	25.000.000	12	24.965.000	100,00	99,86



		1.05.04. 2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	57.000.000	2	174.086.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00	100,00
		1.05.04. 2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	120	521.000.000	270	243.083.369	30	24.146.000	30	22.766.000	100,00	94,28
		1.05.04. 2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	20	15.000.000	5	1.000.000	5	1.775.000	5	1.775.000	100,00	100,00



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

		1.05.04. 2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	20	639.250.000	433	2.367.570.876	368	1.597.175.000	368	1.551.922.250	100,00	97,17
		1.05.04. 2.01.18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0	0	1	1.750.000	1	4.250.000	1	4.250.000	100,00	100,00
		1.05.04. 2.01.001 2	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan					1	24.756.000	1	23.000.000	100,00	92,91
		1.05.04. 2.01.001 5	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen					1	31.500.000	1	30.837.000	100,00	97,90
		1.05.04. 2.02	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Persen	75	165.000.000	100	66.911.250	74	14.262.400	100	12.362.400	135,14	86,68



		1.05.04. 2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	4	20.000.000	2	7.400.000	1	4.850.000	1	4.050.000	100,00	83,51
		1.05.04. 2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	240	145.000.000	60	59.511.250	1	9.412.400	1	8.312.400	100,00	88,31
		1.05.04. 2.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen	90	717.750.000	100	1.355.646.825	89	395.482.750	100	380.779.600	112,36	96,28
		1.05.04. 2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	200	107.750.000	730	499.523.050	800	253.460.200	800	250.437.200	100,00	98,81
		1.05.04. 2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan	Desa/ Kelurahan	26	335.000.000	5	703.046.275	10	117.584.300	10	106.332.800	100,00	90,43



				(SKKL) Setiap Tahunnya											
		1.05.04. 2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Dokumen	20	275.000.000	14	153.077.500	1	24.438.250	1	24.009.600	100,00	98,25
		1.05.04. 2.05	PENYELENGGARAAN OPERASI Pencarian DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	Capaian Pelayanan Penyelenggara n Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persen	100	276.200.000	100	348.837.142	100	245.019.500	100	240.748.985	100,00	98,26
		1.05.04. 2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara n Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	0	0	11	39.112.267	12	39.947.500	12	39.176.985	100,00	98,07
		1.05.04. 2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	0	0	2	6.787.500	1	5.000.000	1	3.350.000	100,00	67,00



		1.05.04. 2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	4	80.700.000	21	59.270.000	1	14.422.000	1	13.572.000	100,00	94,11
		1.05.04. 2.05.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	7	195.500.000	20	243.667.375	1	185.650.000	1	184.650.000	100,00	99,46
JUMLAH							46.595.179.000		52.786.032.763		21.756.899.552	0	19.202.544.924		
Rata-rata capaian kinerja (%)					82,95	80,30									
Predikat kinerja															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:															
<i>Jumlah Relawan dan Penggiat Kebencanaan yang cukup banyak</i>															
<i>Sinergi dengan Dunia Usaha dan Institusi Perguruan Tinggi yang berjalan baik</i>															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:															
<i>Belum Optimalnya Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana</i>															
<i>Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana</i>															



BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bukan Instansi penghasil, sehingga tidak dapat menyajikan pendapatan atau NIHIL

3.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten. Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 21.756.899.552,2,- dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 290.124.900,-
- Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 3.587.087.737,-
- Ganti Uang (GU) KKPD sebesar Rp. 509.303.500,-
- LS Gaji dan Barang Jasa sebesar Rp. 14.310.112.214,-
- Tambahan Uang (TU) Rp. 617.240.000,-

Sehingga Jumlah total Penerimaan sebesar Rp. 19.313.868.351,- atau sebesar sebesar 88,77%.

Sedangkan anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp. 19.202.544.924,-. Terdiri dari:

- SPJ Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 282.559.223
- SPJ Ganti Uang (GU) sebesar Rp.3.587.087.737,-
- SPJ Ganti Uang (GU) KKPD sebesar 509.303.500,-
- SPJ LS sebesar Rp.14.313.112.214,-
- SPJ Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. 513.482.250,-

~~Sehingga jumlah total belanja sebesar Rp. 19.202.544.924 atau sebesar~~

88,26% dari pagu anggaran.

Adapun sisa SP2D UP sebesar Rp.7.565.677 dan sisa TU sebesar Rp. 103.757.750,-.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program ini di dukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan, yaitu ;

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah anggaran di program ini adalah Rp 14.356.180.462,20,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.443.075.877,- atau sebesar 86,67%. adapun realisasi dari kegiatan- kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 14.400.000 terealisasi sebesar Rp. 10.402.633,- atau sebesar 97,32%, output yang dicapai adalah tersusunnya laporan data dan informasi perangkat daerah, dokumen rencana kerja perangkat daerah, rencana kinerja tahunan, serta rencana strategis perangkat daerah.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.975.000 terealisasi sebesar Rp. 12.746.147,- atau sebesar 79,79 %,

laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dan dokumen perjanjian kinerja.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.186.389.919,20 terealisasi Rp. 6.905.371.471 atau sebesar 84,35%. Output yang dicapai adalah terbayarnya gaji dan tunjangan kinerja ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.820.000 terealisasi Rp. 90.480.000 atau sebesar 97,48%. Output yang dicapai adalah terbayarnya honor pengelola keuangan, aset, persediaan, kepegawaian
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.500.000 terealisasi Rp. 8.442.316 atau sebesar 99,32%. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan Keuangan

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 203.700.000 terealisasi Rp. 182.049.000 atau sebesar 89,37%. output yang dicapai adalah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000 terealisasi Rp. 3.475.000 atau sebesar 99,29%. Output yang dicapai adalah koordinasi monitoring dan evaluasi kinerja

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.413.150 terealisasi Rp. 31.131.270 atau sebesar 99,10%. Output yang dicapai adalah terealisasinya pengadaan komponen instalasi dan alat listrik.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.257.800 terealisasi Rp. 49.137.045 atau sebesar 85,82%. Output yang dicapai adalah terlaksananya pengadaan alat tulis kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.171.260 terealisasi Rp. 7.168.000 atau sebesar 99,95%. Output yang

dicapai terlaksananya peralatan rumah tangga.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.045.500 terealisasi Rp. 16.332.055 atau sebesar 95,81%. Output yang dicapai adalah tersedianya obat-obatan, air galon dan gas.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.377.000 terealisasi Rp. 15.376.800 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah tersedianya barang cetak, dan penggandaan.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi Rp. 29.958.228 atau sebesar 99,86%. Output yang dicapai adalah terfasilitasinya kunjungan tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 93.062.000 terealisasi Rp. 84.828.293 atau sebesar 91,15%. Output yang dicapai adalah tersusunya laporan hasil pelaksanaan kegiatan, laporan hasil rapat, serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.125.000 terealisasi Rp. 41.005.000 atau sebesar 92,93%. Output yang dicapai adalah tersusunya daftar arsip aktif dan in aktif pada perangkat daerah.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.250.000 terealisasi Rp. 3.989.500 atau sebesar 93,87%. Output yang dicapai terlaksananya koordinasi Satu Data dan SPBE
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp.49.800.000 terealisasi Rp. 49.425.750 atau sebesar 99,25%. Output yang dicapai adalah pengadaan mebel.
 - Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 493.617.000 terealisasi Rp. 462.595.102 atau sebesar 93,72%. Output yang dicapai adalah terealisasinya pengadaan LCD proyektor, Komputer, scanner, dan printer

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.500.000 terealisasi Rp. 5.500.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah tersediannya Benda Pos (Materai).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000 terealisasi Rp. 12.340.102 atau sebesar 51,42%. Output yang dicapai adalah terbayarnya Rekening air, telepon dan sewa frekuensi radio komunikasi.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.730.751.658 terealisasi Rp. 3.259.289.532 atau sebesar 87,36%. Output yang dicapai adalah terbayarnya honor dan jaminan asuransi Non ASN.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 132.830.000 terealisasi Rp. 124.191.550 atau sebesar 93,50 %. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan pelaksanaan operasional dan perawatan kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 705.191.875 terealisasi Rp. 684.467.522 atau sebesar 97,06%. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan pelaksanaan operasional dan perawatan kendaraan dinas roda 2, kendaraan dinas roda 4, dan kendaraan dinas roda 6.
- Pemeliharaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.450.000 terealisasi Rp. 6.438.000 atau sebesar 99,81%. Output yang dicapai adalah terpeliharanya mebelair
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 97.400.000 terealisasi Rp. 91.015.172 atau sebesar 93,94 %.

~~Output yang dicapai adalah terealisasinya pemeliharaan sistem komunikasi~~

radio, serta terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 285.653.300 terealisasi Rp. 255.920.443 atau sebesar 89,59%. Output yang dicapai adalah terpeliharanya gedung dan bangunan.

B. Program Penanggulangan Bencana

Program ini didukung dengan 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Adapun realisasi dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.204.000 terealisasi Rp. 14.752.703 atau sebesar 91,04%. Output yang dicapai adalah Sosialisasi dokumen kajian Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 656.088.000 terealisasi Rp. 566.109.936 atau sebesar 86,29%. Output yang dicapai adalah warga yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana.

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 304.769.900 terealisasi Rp. 280.068.500 atau sebesar 91,90%. Output yang dicapai adalah 2 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, yang meliputi Kawasan Rawan Bencana Tsunami dan Gempa Bumi.
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.625.000

teralisasi Rp. 10.475.000 atau sebesar 63,93%. Output yang dicapai

adalah Pelatihan teknis keterampilan TRC BPBD.

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.827.500 terealisasi Rp. 64.840.000 atau sebesar 89,03%. Output yang dicapai adalah Gladi lapang/Simulasi kegiatan ini diikuti 250 peserta.
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000 terealisasi Rp. 53.000.000 atau sebesar 96,36%. Output yang dicapai adalah 20 orang perwakilan keluarga dalam satu dusun yang mampu melakukan mitigasi bencana mandiri di tingkat keluarga.
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000 terealisasi Rp. 4.500.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Sosialisasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Peralatan dan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.543.190 terealisasi Rp. 1.467.872.161 atau sebesar 97,82%. Output yang dicapai adalah telaksannya Peralatan dan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.889.000 terealisasi Rp. 78.753.750 atau sebesar 41,69%. Output yang dicapai adalah pelatihan dan mitigasi bencana.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 625.660.000 terealisasi Rp. 591.036.653 atau sebesar 94,47%. Output yang dicapai adalah 12 laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) sesuai dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya atau tercapai sebesar 100% dalam bentuk laporan kejadian bulanan yang disusun Pusdalops PB BPBD Kabupaten Bantul.

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.700.000 terealisasi Rp. 1.700.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah laporan rapat koordinasi dan evaluasi kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas pada tahun 2025
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.950.000 terealisasi Rp. 12.500.000 atau sebesar 73,75%. Output yang dicapai adalah SK Penetapan Siaga Darurat Kekeringan dan Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang pada tahun 2025
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 249.961.900 terealisasi Rp. 219.701.200 atau sebesar 87,89%. Output yang dicapai adalah laporan per kejadian bencana
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 457.970.000 terealisasi Rp. 407.182.091 atau sebesar 88,91%. Output yang dicapai adalah penyediaan berupa logistik bahan mentah, air bersih, bronjong, terpal dan rak penyimpanan
- Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 425.000 terealisasi Rp. 425.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah laporan rapat koordinasi bencana non alam pandemi/wabah pada tahun 2024.
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 263.897.950 terealisasi Rp. 244.434.080 atau sebesar 92,62%. Output yang dicapai adalah Aktivasi 75 Pos Siaga Darurat Bencana setiap Kelurahan di Bantul

5. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.350.000 terealisasi Rp. 13.500.000 atau sebesar 63,23%. Output yang dicapai adalah 1 draft

~~Raperbup Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang sudah~~

melalui proses harmonisasi dengan Kanwil Hukum DIY dan 1 draft Raperbup Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang sedang menunggu jadwal harmonisasi dengan Kanwil Hukum DIY atau tercapai sebesar 85%.

- Penguatan Kelembagaan Bencan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.075.000 terealisasi sebesar Rp. 45.625.500 atau sebesar 65,11%. Output yang dicapai adalah telaksananya musyawarah kerja FPRB Kabupaten Bantul. Terlaksananya rapat rutin pengurus FPRB Kabupaten Bantul.
- Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.850.000 terealisasi Rp. 10.950.000 atau sebesar 79,06%. Output yang dicapai adalah Aparatur BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis dalam Menyusun dokumen pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sejumlah 40 personil.
- Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.955.000 terealisasi 7.788.500 atau sebesar 78,24%. Ouput yang dicapai adalah laporan Rapat Koordinasi Tindak lanjut Pekerjaan Dampak Cuaca Ekstrim.
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kab/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.245.000 terealisasi Rp. 0 atau sebesar 0%. Output pada sub kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan tidak ada bencana masif yang membutuhkan dokumen Jitupasna.

C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran

Program ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Adapun realisasi dari kegiatan - kegiatan tersebut adalah :

1. Sub Kegiatan dari Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota adalh sebagai berikut :

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.775.000 terealisasi Rp. 9.775.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Tersusunnya SOP inspeksi sistem proteksi kebakaran.
- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 263.400.000 terealisasi Rp. 242.063.038 atau sebesar 91,94%. Output yang dicapai adalah terpenuhinya operasional armada dan kebutuhan sektor pemadam kebakaran (BBM armada, logistik sektor dan gas)
- Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000 terealisasi Rp. 24.965.000 atau sebesar 99,86%. Output yang dicapai adalah terpenuhinya logistik/konsumsi petugas damkarmat pada saat operasi penanganan kejadian kebakaran.
- Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi Rp. 5.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah terdatanya peralatan pendukung penaggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.146.000 terealisasi Rp. 22.766.000 atau sebesar 94,28%. Output yang dicapai adalah meningkatnya keterampilan petugas damkarmat dalam proses penanganan kebakaran.
- Pengelolaan Sistem komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.775.000

teralisasi Rp. 1.775.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah

- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

terbentuknya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan pada 5 desa/kalurahan.

- Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.756.000 terealisasi Rp. 23.000.000 atau sebesar 92,91%. Output yang dicapai adalah tercapainya pelatihan bagi 2 orang pejabat fungsional sebagai inspektur pemadam.
- Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan pagu sebesar Rp. 31.500.000 terealisasi Rp. 30.837.000 atau sebesar 97,90%. Output yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen RISPK.
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dengan pagu anggaran Rp. 1.597.175.000 terealisasi Rp. 1.551.922.250 atau sebesar 97,17%. Output yang dicapai adalah tersediannya sarana dan prasarana pendukung proses penanganan dan penanggulangan kebakaran.
- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.250.000 terealisasi Rp. 4.250.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Koordinasi lintas sektor Pdam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul.

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.860.000 terealisasi Rp. 4.050.000 atau sebesar 83,51%. Output yang dicapai adalah Terdatanya Sistem Proteksi kebakaran yang ada di bangunan gedung perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
- Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.412.400 terealisasi Rp. 8.312.400 atau sebesar 88,31%. Output yang dicapai adalah Pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi

sehingga mengetahui kelayakan sistem proteksi kebakaran tersebut.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 263.460.200 terealisasi Rp. 250.437.200 atau sebesar 98,81 %. Output yang dicapai adalah Mengkatnya jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan pemadam Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 117.584.300 terealisasi sebesar Rp. 106.332.800 atau sebesar 90,43%. Output yang dicapai adalah Terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran.
- Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasaranan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.438.250 terealisasi Rp. 24.009.600 atau sebesar 98,25%. Output yang dicapai adalah Tersediannya sarana prasarana pendukung ketugasan relawan pemadam kebakaran di wilayah manajemen kebakaran.

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.947.500 terealisasi Rp. 39.176.985 atau sebesar 98,07 %. Output yang dicapai adalah terpenuhinya logistik/konsumsi petugas damkarmat pada saat melakukan evakuasi dan penyelamatan.
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan Evakuasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi Rp. 3.350.000 atau sebesar 67%. Output yang dicapai adalah terdatanya kelayakan peralatan evakuasi dan penyelamatan di setiap sektor pemadam

kebakaran dan penyelamatan yang berada di Kabupaten Bantul.

- Pembinaan Aparatur Pencariandan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.422.000 terealisasi Rp. 13.572.000 atau sebesar 94,11%. Output yang dicapai adalah meningkatnya keterampilan petugas damkarmat untuk penanganan evakuasi/penyelamatan.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 185.650.000 terealisasi Rp. 184.650.000 atau sebesar 99,46%. Output yang dicapai adalah tersediannya sarana prasarana pendukung proses penyelamatan dan evakuasi.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025, berikut beberapa permasalahan yang sedang dihadapi BPBD adalah sebagai berikut:

- 3.2.1 Sistem pemulihan pasca bencana belum optimal
- 3.2.2 Kecepatan dan kualitas respon bencana dan kebakaran belum optimal
- 3.2.3 Keterbatasan Prasarana, Sarana dan SDM
- 3.2.4 Koordinasi lintas Sektor dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bantul dan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah Basis Akrua, entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi berbasis akrua, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

BAB V

Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi Anggaran dengan, realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2025 struktur DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya meliputi komponen belanja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan, sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Bantul. Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1 Perincian dan Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja Operasi

Pagu anggaran pada belanja operasi sebesar Rp. 17.982.392.012,20 terealisasi sebesar Rp. 15.533.516.818,00 atau sebesar 86,38%.
Belanja operasi meliputi :

A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 8.186.389.919,20 terealisasi sebesar Rp. 6.905.371.417,00 atau sebesar 84,35%

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.796.002.093,00 terealisasi sebesar Rp. 8.628.145.401,00 atau sebesar 88,07%

5.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 3.774.507.540,00 terealisasi sebesar Rp. 3.669.028.106,00 atau sebesar 97,20%.
Belanja Modal terdiri dari :

A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 3.333.857.540,00 terealisasi sebesar Rp. 3.233.365.126,00 atau sebesar 96,98%

B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 432.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 427.662.980,00 atau sebesar 98,84%

C. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.000.000,00 atau sebesar 100%

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 137.595.000 terealisasi sebesar Rp. 135.595.500 atau sebesar 98,55%.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, dapat disajikan seperti tabel berikut ini :

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5	BELANJA DAERAH	21.756.899.552,20	19.202.544.924,00	88,25
5.1	BELANJA OPERASI	17.982.392.012,20	15.533.516.818,00	86,38
5.1.01	Belanja Pegawai	8.186.389.919,20	6.905.371.417,00	84,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.796.002.093,00	8.628.145.401,00	88,07
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.982.392.012,20	15.533.516.818,00	86,38
5.2	BELANJA MODAL	3.774.507.540,00	3.669.028.106,00	97,20
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.333.857.540,00	3.233.365.126,00	96,98
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	432.650.000,00	427.662.980,00	98,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.774.507.540,00	3.669.028.106,00	97,20
	JUMLAH BELANJA	21.756.899.552,20	19.202.544.924,00	88,25

5.2 Perincian dan Penjelasan Pos - Pos Neraca

Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disajikan pada tabel seperti berikut :

NERACA
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	24.525.925.463,83	23.909.988.457,93
1.1	ASET LANCAR	1.982.654.473,00	883.045.662,00
1.1.12	Persediaan	1.982.654.473,00	883.045.662,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.982.654.473,00	883.045.662,00
1.3	ASET TETAP	22.472.864.590,83	22.923.095.195,93
1.3.01	Tanah	377.421.375,00	377.421.375,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	23.173.270.167,07	22.172.092.590,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	19.120.135.477,00	18.692.472.497,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	967.267.500,00	959.267.500,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	50.099.077,00	50.099.077,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(21.215.329.005,24)	(19.328.257.843,07)
	JUMLAH ASET TETAP	22.472.864.590,83	22.923.095.195,93
1.5	ASET LAINNYA	70.406.400,00	103.847.600,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	167.206.000,00	167.206.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(96.799.600,00)	(63.358.400,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	70.406.400,00	103.847.600,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	24.525.925.463,83	23.909.988.457,93
2	KEWAJIBAN	1.019.526,00	1.018.719,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.019.526,00	1.018.719,00
2.1.06	Utang Belanja	1.019.526,00	1.018.719,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.019.526,00	1.018.719,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.019.526,00	1.018.719,00
3	EKUITAS	24.524.905.937,83	23.908.969.738,93
3.1	EKUITAS	24.524.905.937,83	23.908.969.738,93
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(17.992.469.516,39)	(14.786.099.804,40)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	19.202.544.924,00	15.774.767.047,00

	JUMLAH EKUITAS	24.524.905.937,83	23.908.969.738,93
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24.525.925.463,83	23.909.988.457,93

5.3 Perincian dan Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disajikan pada tabel seperti berikut :

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	17.992.469.516,39	14.786.099.804,40	3.206.369.711,99	21,69
8.1	BEBAN OPERASI	15.186.258.815,00	13.028.222.411,74	2.158.036.403,26	16,56
8.1.01	Beban Pegawai	6.905.371.417,00	5.462.618.308,00	1.442.753.109,00	26,41
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.280.887.398,00	7.565.604.103,74	715.283.294,26	9,45
	JUMLAH BEBAN OPERASI	15.186.258.815,00	13.028.222.411,74	2.158.036.403,26	16,56
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.806.210.701,39	1.757.877.392,66	1.048.333.308,73	59,64
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.302.821.979,07	1.205.949.375,95	1.096.872.603,12	90,96
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	386.048.052,32	436.257.946,71	(50.209.894,39)	(11,51)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.899.470,00	83.699.470,00	200.000,00	0,24
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	33.441.200,00	31.970.600,00	1.470.600,00	4,60
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.806.210.701,39	1.757.877.392,66	1.048.333.308,73	59,64
	JUMLAH BEBAN	17.992.469.516,39	14.786.099.804,40	3.206.369.711,99	21,69
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.992.469.516,39)	(14.786.099.804,40)	(3.206.369.711,99)	21,69

5.4 Perincian dan Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan

Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disajikan pada tabel seperti berikut :

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	23.908.969.738,93	21.086.499.653,59
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(17.992.469.516,39)	(14.786.099.804,40)
RK PPKD	19.202.544.924,00	15.744.767.047,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(594.139.208,71)	1.833.802.842,74
EKUITAS AKHIR	24.524.905.937,83	23.908.969.739,00

5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul memuat informasi terstruktur mengenai kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan pencapaian program kerja. Dokumen ini terdiri dari pendahuluan (landasan hukum), laporan realisasi anggaran, neraca, serta penjelasan pos-pos keuangan, yang disusun untuk akuntabilitas.

BAB VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

6.1 Umum

Secara umum kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat diuraikan menjadi :

6.1.1 Administrasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan/ melaksanakan fungsi penunjang sebagai koordinator, komando dan pelaksana dalam bidang penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Di Tahun 2023 ada perubahan SOTK yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan progam kerja Badan;
- b. Perumusan rencana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kementraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta penyelamatan;

- c. Penyusunan pedoman dan pengarahan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- e. Penetapan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
- f. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- h. Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- i. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- j. Pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- m. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- n. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, kearsipan perpustakaan, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana

dan kebakaran serta penyelamatan; dan

- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :

a. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul secara ex officio adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah beranggotakan sembilan orang dengan komposisi 5 (lima) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan 4 (empat) orang adalah dari kalangan profesional.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPBD.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Badan;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Badan;
- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- n. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;

- q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretariat terdiri dari 1 Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dan 2 Sub Bagian. Sub bagian terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
- i. Penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;

- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- l. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- d. Penatausahaan keuangan Badan;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Badan;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;

- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- j. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- k. Pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pedoman di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
- c. penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan kebencanaan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana;
- h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana;
- j. penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi bencana;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pasca bencana;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana terdiri dari 2 Jabatan Fungsional yaitu : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

3. Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik, sarana prasarana serta penanganan pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan dan pasca bencana, yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan serta kebijakan teknis fasilitasi logistik dan sarana prasarana penanganan dan pasca bencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- d. penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi logistik dan peralatan;
- f. penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
- g. pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan

- serta evakuasi korban bencana;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan;
 - j. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum;
 - k. pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana
 - l. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
 - m. penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit
 - n. pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital
 - o. pelaksanaan penempatan pengungsi
 - p. pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi
 - q. pelaksanaan pemulihan dan peningkatan layanan publik
 - r. pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi
 - s. penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana
 - t. pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan serta rehabilitasi, rekonstruksi
 - u. pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi
 - v. penyelenggaraan kedaruratan bencana, logistik,

peralatan dan rehabilitasi, rekonstruksi

- w. pelaksanaan kerjasama dalam penanganan keadaan darurat bencana dan pasca bencana
- x. pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan penanganan darurat, logistik, peralatan, rehabilitasi dan rekonstruksi
- y. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Kedaruratan Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
- z. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari Jabatan Fungsional yaitu Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda.

4. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. pelaksanaan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- e. pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR), sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- g. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi, dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan command center;
- h. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- i. penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- j. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- k. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- l. pelaksanaan perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- m. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebarar dan penyelamatan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 3 Pejabat Fungsional yaitu Analis Kebakaran Ahli Muda

6.1.2 Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung Sebagian besar anggota Satgas adalah non-ASN atau Tenaga Kontrak yang bertugas 24 jam 7 hari secara bergilir (shift). Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BPBD Kabupaten Bantul 188 Personil terdiri dari PNS 29 orang, PPPK Penuh Waktu 66 orang dan PPPK Paruh Waktu 93 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih banyak membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata I dan Strata II untuk mendukung penyusunan :

1. Program dan perencanaan kegiatan di BPBD
2. Perencanaan penanggulangan bencana
3. Pengurangan risiko bencana
4. Pencegahan

5. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
6. Analisis risiko bencana
7. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan
8. Standar teknis penanggulangan bencana

6.1.3 Produktifitas

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang belum dioptimalkan misalnya;

- a. Harmonisasi staf dan struktural
- b. Keterangan tugas masing-masing personil
- c. Sosialisasi dan Pelatihan (TRC, Risk Assessment, Komputer, Internet dll)

6.2 Khusus

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana
- b. Pemahaman lembaga usaha terhadap penanggulangan bencana
- c. Perubahan cuaca ekstrem

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan sosialisasi kebencanaan yang tinggi
- b. Terbukanya akses dinas terkait dan pelaku usaha
- c. Terbentuknya sekolah-sekolah sebagai sekolah siaga bencana
- d. Terbentuknya desa sebagai desa tangguh bencana
- e. Terbentuknya kabupaten sebagai kabupaten tangguh bencana
- f. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan

6.3 Lain-Lain

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan usaha meminimalisir kerugian akibat suatu bencana baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pembangunan Fisik maupun SDM pada saat ini baru akan bermanfaat bila terjadi bencana, namun kerugian akibat bencana dapat di tekan seminimal mungkin paling tidak korban manusia, bila kita mampu melakukan upaya – upaya pengurangan risiko bencana misalnya :

- d. Penguatan kelembagaan FPRB tingkat desa
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air
- f. Inspeksi pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- g. Penanaman Cemara di pinggir pantai untuk mengurangi kecepatan gelombang tsunami
- h. Peningkatan pendidikan masyarakat tentang bencana
- i. Peningkatan kesadaran masyarakat hidup harmoni, selaras, serasi, dan seimbang dengan alam
- j. Mengajarkan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pendidikan
- k. Peningkatan penanganan bencana di tingkat dunia usaha/ pengusaha
- l. Simulasi penanggulangan bencana di tingkat sekolah, desa, dan kabupaten.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan dikawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, dropping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Pada daerah-daerah sesar/ wilayah rawan bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum, kecuali dengan standar konstruksi tahan gempa dan rutin dilakukan pendidikan mitigasi bencana;
- b. Pada daerah-daerah wilayah rawan bencana, dibentuk Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA), Sekolah Pendidikan Aman bencana (SPAB), kedepan akan membentuk kantor dan rumah ibadah siaga bencana.
- c. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, dan EWS di sepanjang pantai serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi berbagai pihak untuk menyampaikan saran dan kritik agar pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mampu lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Bantul tercinta.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjelasan dan informasi keuangan Tahun 2025. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini.